

Jalan Terjal Intervensi Ankara

Oleh: Luerdi*

Pekanbaru, 13 Maret 2014

Revolusi di negeri-negeri Arab yang dikenal dengan *Arab Spring* telah menjadi fenomena politik kawasan Timur Tengah khususnya dan global umumnya. Revolusi ini bermula dari Tunisia yang bertujuan menuntut mundur penguasa tiran Ben Ali yang kemudian menyebar ke sejumlah negara Arab seperti Mesir, Libya, Aljazair, Suriah, dan lainnya. Namun kasus revolusi yang semakin berlarut dan rumit di Suriah menciptakan destabilisasi pelik kawasan dan bahkan bisa menjadi momentum untuk mematikan spirit revolusi di negara-negara Arab lainnya.

Tuntutan lengsernya rezim Al Assad mulai terjadi pada awal 2011 silam. Memasuki tahun ke empat, revolusi Suriah masih tetap menjadi perang saudara yang mematikan dan memakan ribuan korban jiwa. Di balik realitas demikian, konflik Suriah ternyata tidak hanya sekedar perseteruan antara kubu pro-Assad dan kelompok pemberontak, tetapi juga tempat persaingan berbagai kepentingan melalui eksistensi dan tumbangnya sebuah rezim.

Sebagai kekuatan yang pengaruhnya sedang diperhitungkan baik di kawasan Timur Tengah dan Eropa dengan kondisi perekonomian dan militer yang mendukung, Turki merasa perlu untuk melakukan intervensi dalam krisis Suriah. Dengan kata lain, melibatkan diri dalam konflik Suriah untuk melakukan *power exercise* di luar teritorinya. Turki juga yang sangat keras mengkritisi kekejaman rezim Assad, dengan tegas dan terang-terangan menghendaki segera berakhirnya rezim Assad.

Ikhtwal intervensi Turki adalah kebijakan *open-door policy* bagi para pengungsi Suriah untuk memasuki wilayah Turki. Turki mulai menunjukkan penentangan terbuka terhadap

rezim Assad ketika Assad mulai menggunakan cara-cara represif dan senjata kimia menghadapi kelompok oposisi yang menyebabkan korban sipil.

Turki menyadari bahwa menentang rezim Assad adalah pilihan sulit. Keinginan Turki agar Assad segera lengser dari kekuasaan akan terhambat oleh kepentingan aktor-aktor lain seperti Rusia, Cina, dan Iran. Ketiga negara ini ikut andil dalam dinamika geopolitik di Suriah dan memiliki hubungan kuat dengan Assad. Misalnya Rusia telah dua kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB terkait krisis Suriah. Namun, bagi Turki pilihan tersebut adalah yang terbaik bagi kepentingan nasionalnya.

Krisis Suriah menjadi momentum yang tepat bagi Turki untuk mengkampanyekan lengsernya rezim Assad. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Assad menjadi pembenaran intervensi Turki dalam krisis Suriah. Turki secara terang-terangan mengusulkan satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan rakyat Suriah adalah dengan melengserkan kepemimpinan Assad.

Di balik penentangan terhadap rezim Assad, Turki memiliki beberapa kepentingan strategis. *Pertama*, penyebaran pengaruh di kawasan Timur Tengah. Konflik antara pihak oposisi yang menganut paham Sunni dan pihak Assad yang menganut paham Syi'ah terlihat jelas. Walaupun merupakan negara yang menganut sekulerisme, mayoritas warga dan pemerintahan yang berkuasa di Turki menganut Sunni sehingga kebijakan luar negeri Turki mendukung pihak oposisi

Turki ingin mendapatkan simpati dari mayoritas negara di Timur Tengah yang pemerintahannya dijalankan oleh penganut Sunni. Dalam hal ini Turki ingin meningkatkan *soft power* dalam ikatan

diplomasi dan ekonomi di hadapan negara-negara tersebut dengan keterlibatannya dalam krisis Suriah. Proyek penyebaran pengaruh Turki dapat diperkuat dengan pernyataan menteri luar negerinya - Ahmet Davutoglu di hadapan parlemen Turki pada tahun 2012 lalu - yang menyatakan bahwa sebuah Timur Tengah baru (*a new Middle East*) akan segera lahir dan Turki akan menjadi pemilik, pionir, dan pelayan bagi Timur Tengah baru tersebut.

Kedua, membendung atau membatasi ambisi Iran. Walau Turki menentang sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Iran dan pelarangan internasional terhadap pengayaan uraniumnya, Turki berupaya untuk membatasi ambisi Iran sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. Iran merupakan sekutu tradisional rezim Assad tidak hanya karena kesamaan paham Syi'ah tapi juga kesamaan kepentingan dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Bagi Turki, lengsernya rezim Assad akan mereduksi kekuatan Iran di Timur Tengah.

Ketiga, berkaitan dengan stabilitas politik dalam negeri. Lengsernya Assad akan membantu menciptakan stabilitas dalam negeri Turki. Negara ini masih sedang menghadapi masalah stabilitas internal terkait dengan pemberontakan yang dilakukan suku Kurdi (PKK). Dalam perjalanan sejarah pemberontakan PKK, rezim Assad terlibat dalam membantu gerakan separatis tersebut. Minoritas Kurdi yang ada di Suriah juga menjadi penghambat stabilitas internal Turki sebab Kurdi Suriah memiliki hubungan strategis dengan pemberontak Kurdi Turki. Sementara rezim Assad enggan untuk mencegah keterlibatan Kurdi Suriah dalam pemberontakan Kurdi Turki. Bahkan Assad menjadikan minoritas Kurdi di Suriah untuk mengancam stabilitas internal Turki.

Dengan melihat penjelasan diatas, jelas bahwa menentang rezim Assad merupakan sikap politik Turki. Turki telah melakukan intervensi dalam krisis Suriah tidak hanya dengan bersedia menampung pengungsi Suriah tapi juga memberikan dukungan pada kelompok pemberontak atau pro-revolusi. Tindakan repressif Assad terhadap kubu pro-revolusi

mendorong Turki mengakhiri hubungan baik dengan Assad. Dalam beberapa pemberitaan disebutkan Turki memberikan bantuan finansial dan persenjataan kepada kelompok pemberontak. Turki juga menjadikan wilayahnya sebagai basis gerakan dan pelatihan bagi pemberontak untuk menggulingkan rezim Assad.

Di awal-awal tuntutan revolusi Suriah – seperti yang disampaikan oleh Erdogan; Perdana Menteri Turki dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Aljazeera – pemerintahan Turki berupaya membujuk Assad agar menghentikan pertempuran dengan kelompok oposisi dan menganjurkan mundur secara damai. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Assad.

Menyadari kecilnya kemungkinan Assad bersedia mundur dari kepemimpinan Suriah, Turki memiliki pandangan intervensi militer adalah pilihan yang terbaik. Turki aktif melakukan pendekatan dengan beberapa kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menginisiasi intervensi militer dalam krisis Suriah. Turki bahkan menyatakan kesediaannya untuk mengirimkan pasukan – baik dibawah koordinasi NATO ataupun PBB – untuk mengakhiri krisis.

Saat ini krisis Suriah sedang dibicarakan pada Jeneva II, yang merupakan pertemuan antara pihak yang berseteru di Suriah beserta negara-negara yang menjadi aktor dalam krisis, bertujuan untuk membahas masa depan Suriah yang diadakan di Jenewa - Swiss. Jeneva II merupakan kelanjutan dari Jeneva I yang sebelumnya gagal menghasilkan suatu kesepakatan penting. Turki merupakan salah satu negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut dan termasuk vokal dalam mengkampanyekan penyelesaian krisis kemanusiaan di Suriah. Namun Turki tetap pada pendiriannya, perdamaian akan bisa terwujud tanpa kepemimpinan Assad.

Beberapa kebijakan luar negeri Turki yang berani dan kontroversial mengindikasikan bahwa Turki ingin muncul sebagai aktor penting khususnya di kawasan Timur Tengah. Dalam kasus Suriah, keberadaan Turki di antara kekuatan-kekuatan besar akan membuat jalan intervensinya tidak

mulus dan berbenturan dengan kepentingan negara-negara tersebut. Bila pemerintahannya tidak mengantisipasi, kebijakan intervensi bisa membawa kerugian bagi Turki.

Di dalam negeri Turki sendiri, kebijakan intervensi mulai tidak populis dan merusak popularitas pemerintah dan partai politik yang berkuasa. Pemberontakan Kurdi kembali bergolak seiring dengan kebijakan Turki dalam krisis Suriah. Ditambah lagi masalah pengungsi Suriah yang jumlahnya terus bertambah dan menguras anggaran pemerintah Turki. Ankara tentunya menghadapi jalan terjal dalam krisis Suriah.

* Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Riau. Artikel ini selesai ditulis 13 Maret 2014.